

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Memasuki abad ke-20, terdapat peristiwa-peristiwa penting yang berarti bagi perubahan ke arah perbaikan penduduk Pribumi. Politik Etis dapat dikatakan sebagai salah satu pintu masuk yang mendorong adanya perbaikan bagi kesejahteraan tersebut. Adalah Van Deventer seorang tokoh liberal yang melancarkan politik progresif dengan pemikirannya tentang 'hutang kehormatan' yang harus dipenuhi oleh Belanda. Pada tahun 1899, tulisannya yang berjudul *Een Eereschuld* atau Hutang kehormatan tersebut dimuat dalam majalah *De Gids* (Leirissa, 1985, p. 21). P. Brooshoof redaktur koran *De Locomotief*, menuliskan rangkuman mengenai *De Etische koers in koloniale politiek* (Haluan etis dalam politik kolonial) pada satu brosur pada tahun 1903 agar pemerintah Belanda membayarkan hutang budinya (Syukur, 2017, p. 46). Ratu Belanda secara resmi memberlakukan Politik Etis atau Politik Balas Budi di Hindia Belanda pada tahun 1901 yang mengedepankan tiga programnya yaitu pada bidang irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Pada bidang pendidikan, setidaknya terjadi peningkatan golongan terpelajar penduduk pribumi yang nantinya akan membuka pemikiran mereka untuk mengadakan suatu perhimpunan.

Pendidikan yang semakin meluas dikalangan penduduk pribumi juga membuat peranan pemuda semakin kuat dalam memberikan pengaruh bagi kesadaran dan kemajuan bangsa. Di Minangkabau, terdapat dua macam pendidikan yang berkembang yaitu pendidikan tradisional dan modern. Pendidikan tradisional

lebih familiar dikalangan penduduk pribumi di Minangkabau karena mereka menggunakan sistem pengajaran di surau yang sudah lebih dahulu melekat dalam masyarakatnya. Kehadiran surau sebagai lembaga pendidikan tertua di dalam masyarakat Minangkabau, bahkan sudah lebih dahulu ada sebelum masuknya ajaran Islam dan melewati proses Islamisasi seiring dengan perkembangan Islam yang mendominasi (Zein, 2012, p. 26). Akan tetapi, pendidikan Islam bukan berarti tidak bisa menggunakan sistem pengajaran modern. Meskipun pada awal perkembangannya, sekolah-sekolah Belanda mendapat penolakan keras dari sebagian kalangan Islam terkemuka, namun seiring berjalannya waktu keterbukaan pemikiran akan kemajuan zaman mengubah cara pandang mereka dalam menyikapi pendidikan modern tersebut. Mengikuti perkembangan dan kesadaran untuk menuntut ilmu, sekolah-sekolah Islam modern banyak dibangun di Minangkabau guna memenuhi keseimbangan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan secara umum dengan menyesuaikan sistem modern. Sekolah Adabiyah di Padang, menjadi sekolah Islam modernis pertama yang didirikan pada tahun 1909. Selanjutnya tidak kalah penting adalah sekolah Thawalib di Padang Panjang yang terus berupaya mengembangkan pendidikan modernis dengan tetap menggunakan dasar ajaran agama Islam dalam model pembelajarannya.

Pendidikan modern dalam praktiknya, menggunakan sistem pengajaran Barat yang dibawa oleh pemerintah kolonial dan meluas pasca diberlakukannya kebijakan Politik Etis. Sekolah MULO (*Meer Uit-gebreid Lager Onderwijs*) atau pendidikan rendah yang setara dengan SLTP, didirikan pada tahun 1914 di Hindia Belanda sebagai sekolah lanjutan untuk memenuhi pendidikan bagi golongan kelas

atas masyarakat Pribumi, dan golongan Cina maupun Eropa yang telah selesai dari pendidikan dasar (Ricklefs, 2008, p. 343). Dari sekolah-sekolah MULO nantinya banyak menghadirkan murid-murid yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan dan keanggotaan Jong Sumatranen Bond cabang Padang. Terbukanya sikap orang Minangkabau dan pemanfaatan yang baik terhadap pendidikan modern, membuahakan kemajuan yang dampaknya masih dapat dirasakan hingga saat ini. Akhirnya, baik pendidikan tradisional maupun modern keduanya dapat diterima dan berjalan secara berdampingan didalam masyarakat Minangkabau. Pendidikan di Minangkabau menjadi salah satu perantara dalam menumbuhkan gerakan anti kolonial yang berkembang dikalangan pemuda pelajar. Menurut Taufik Abdullah, setelah pecahnya pemberontakan 1908 di Sumatra Barat, orang Minang tercerahkan dengan adanya pemikiran untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang lebih efektif jika menggunakan otak, bukan otot (TEMPO, 2018, 54). Maka, di tahun-tahun awal abad 20-an jumlah kaum terpelajar meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan semangat dalam mengenyam pendidikan baik laki-laki maupun perempuan. Lebih lanjut, Taufik Abdullah menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri pada tahun 1920-an, wilayah Sumatra Barat juga menjadi salah satu titik pergerakan politik nasional selain Batavia (TEMPO, 2018, p. 54).

Kota Padang adalah tempat lahirnya liberalisme di pesisir Barat Sumatra. Kedudukan Padang menjadi pusat pelabuhan, perdagangan, dan bahkan pemerintahan Belanda di Sumatra Barat masih dapat dirasakan hingga abad ke 20 (Safwan et al., 1987, p. 2). Hal tersebut dipastikan karena lokasinya yang berada di pintu gerbang ke wilayah Sumatra Barat Minangkabau. Sekolah-sekolah maupun

kantor-kantor pemerintahan di kota Padang sudah berdiri sejak abad ke-19 dengan membentuk pola eksklusif dimana unsur birokratis dan pasar menjadi bagian vital dalam struktur sosial kota (Zed, 2009, p. 7). Berkembangnya struktur sosial masyarakat ini merupakan salah satu bentuk perubahan dari adanya pengaruh pemerintahan kolonial Belanda.

Di Batavia, berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 menjadi cikal bakal dalam pergerakan nasional untuk tanah Jawa. Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo dan teman-temannya, para pelajar STOVIA dan akhirnya merealisasikan terbentuknya organisasi yang bernama Budi Utomo. Tujuannya sendiri secara samar mengenai kemajuan bagi Hindia, dimana jangkauannya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura (Poesponegoro & Notosusanto, 1993, p. 177-178). Budi Utomo terus berkiprah menjadi organisasi yang bergelut dibidang sosial-budaya dengan kemajuan yang dapat dilihat dari semakin banyaknya cabang-cabang organisasi tersebut di berbagai daerah, serta jumlah anggotanya yang kian bertambah.

Adanya organisasi pergerakan pemuda kedaerahan di Batavia menunjukkan heterogenitas suku bangsa dari berbagai wilayah di Hindia Belanda dengan tujuan yang tidak jauh berbeda, memajukan daerah dan budaya mereka masing-masing (Suwardi, 2007, p. 29). Dari inisiatif para pemuda, lahir organisasi bersifat kedaerahan maupun nasionalis yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan persatuan. Masa ini yang dikenal juga sebagai zaman pergerakan nasional. Istilah dari pergerakan nasional sendiri digunakan dalam menyebut satu fase di sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun waktu 1908-

1945 (Ahmadin, 2017, p. 1). Hal ini sejalan dengan tumbuhnya rasa nasionalisme pada batang tubuh organisasi yang ada dimasa pergerakan nasional. Nasionalisme yang dimaksud adalah yang sesuai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau sifat kenasionalan. Menurut tokoh sejarawan Indonesia Sartono Kartodirdjo, sebagai fenomena historis, nasionalisme timbul menjadi jawaban atas kondisi-kondisi historis, sosial, politik, dan ekonomi (Agung, 2013, p. 98). Nasionalisme yang berkembang di masa pergerakan nasional, merupakan kelanjutan reaksi dari adanya kolonialisme oleh Belanda namun dengan bentuk perlawanan yang berbeda.

Disisilain, pada tahun yang sama dengan berdirinya Budi Utomo, pemberontakan anti Belanda pecah seiring dengan ditetapkannya pajak langsung di daerah Minangkabau. Pajak langsung dibuat untuk menggantikan perjanjian dalam Plakat Panjang yang menghapus tanam paksa pada masyarakat Minangkabau karena disebabkan oleh jatuhnya harga kopi (Kahin, 2005, p. 11). Pergantian kebijakan tersebut adalah bukti inkar janji Belanda terhadap masyarakat Minangkabau sehingga menimbulkan respon yang tidak baik dan mencuatlah perlawanan yang dipimpin oleh para ulama. Timbulnya pemberontakan 1908 ini, menjadi manifestasi awal adanya nasionalisme anti-penjajahan setelah Perang Paderi di tahun 1803 dan disamping berdirinya Budi Utomo yang menjembatani nasionalisme dikalangan kaum terpelajar di Jawa.

Perhimpunan Indonesia (sebelumnya bernama *Indische Vereeniging*), Budi Utomo, Sarekat Islam, dan *Indische Partij*, adalah beberapa contoh dari berdirinya organisasi awal pergerakan nasional di Indonesia. Tidak hanya itu, berbagai

organisasi kedaerahan mulai bermunculan dengan latar etnis yang berbeda antara lain: Jong Java (Awalnya bernama Tri Koro Dharmo, 1915), Jong Sumatranen Bond (1917), Jong Celebes (1918), Sekar Rukun (1919), Jong Ambon (1923), Jong Bataks Bond (1925), Pemuda Kaum Betawi (1927). Kata Etnis sendiri menurut Asmore (2001), adalah suatu identifikasi atau kategori sosial. Ini merupakan sebuah konsep yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan ciri khas sosial yang berbeda dari kelompok masyarakat lainnya (Sibarani, 2013, p. 2). Adapun organisasi yang secara langsung menaruh minatnya kearah kebangsaan Indonesia antara lain: Perhimpunan Indonesia (1922), Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (1926), Pemuda Indonesia (1927), Indonesia Moeda (1930). Kelompok-kelompok tersebutlah yang menjadi bagian penting dari adanya suatu gerakan pemuda modern diabad ke-20.

Selain Budi Utomo, STOVIA merupakan tempat kelahiran berbagai perhimpunan yang berperan dalam masa pergerakan nasional seperti Tri Koro Dharmo. Salah satu alasan berdirinya Tri Koro Dharmo adalah sudah tidak efektifnya Budi Utomo sebagai perkumpulan kaum muda dengan semangat pemudanya. Maka pada tahun 1915, Satiman Wirjosandjojo seorang pelajar STOVIA berinisiatif untuk mendirikan perhimpunan bagi pelajar-pelajar Jawa dan Madura rentang pendidikan menengah dan lanjut. Pada 1918, Tri Koro Dharmo memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Jong Java untuk mengurangi sifat Jawa-sentris, hal ini juga karena adanya ketidak sukaan dari pemuda Sunda dan Madura yang menjadi bagian dari perkumpulan tersebut (Poesponegoro & Notosusanto, 1993, p. 191).

Pendirian Jong Java sebagai perkumpulan pemuda kedaerahan, diikuti jejaknya oleh pemuda Sumatra yang berhimpun dalam Jong Sumatranen Bond pada tahun 1917. Pendirian ini dilakukan sebagai minat dari pelajar-pelajar yang berasal dari Sumatera untuk membentuk wadah perkumpulan antarsesamanya. Mereka merasa perlu mendirikan organisasi untuk kepentingan nasional mereka sendiri dan sebagai tempat mengungkapkan aspirasi. Tepatnya hari Minggu tanggal 9 Desember 1917 di Gedung Volkslectuur, Jong Sumatranen Bond terbentuk dengan penciptaan namanya sendiri yang terjadi setelah mereka berhimpun terlebih dahulu. Sekitar 150 peserta hadir dalam pertemuan itu dan 90 diantaranya merupakan siswa yang berasal dari sekolah menengah di Batavia. Dari jumlah tersebut, 33 diantaranya merupakan murid yang berasal dari STOVIA (Djohan, 1980, p. 33). Menurut Magdalia Alfian, Volkslectuur (Balai Pustaka) yang pada saat itu dipimpin oleh Sutan Pamuntjak menjadi tempat rapat dan didirikannya organisasi JSB karena kemungkinan para pemuda Sumatra banyak yang bekerja disana (Suwardi, 2007, p. 29).

Pemikiran-pemikiran awal Jong Sumatranen Bond banyak dipengaruhi oleh para teosof. Teosof atau teosofos mengacu kepada seseorang yang ahli dalam mengkaji teosofi. Gerakan teosofi di Hindia Belanda memiliki pengaruh besar khususnya pada periode awal masa pergerakan nasional, yaitu 1908 sampai 1926, maka periode tersebut dikenal juga sebagai zaman asosiasi. Teosofi sendiri merupakan mahzab esoteris Barat yang memiliki misi untuk melestarikan kebijaksanaan kekal yang menjadi intisiasi dari kebenaran religius maupun saintifik dan mewujudkan persaudaraan manusia secara universal (Niwandhono, 2017, p.

11). Ini juga menjadi penyebab utama berdirinya Jong Sumatranen Bond, yaitu karena ceramah dari salah seorang teosof bernama L.J. Polderman tentang “Nationaal Bewustzijn” atau “Kesadaran Nasional” (Miert, 2003, p. 76). Dalam perkembangannya, didirikan pula cabang-cabang Jong Sumatranen Bond di berbagai wilayah seperti Padang, Fort de Kock, Surabaya, Serang, Buitenzorg, Sukabumi, bahkan Bandung.

Cabang Padang memainkan peranan penting dalam eksistensi dan kiprah Jong Sumatranen Bond sebagai organisasi pemuda selain wilayah pusat, Batavia. Hal ini berkaitan dengan tradisi *rantau* yang melekat dalam diri masyarakat Sumatra Barat. “*Merantau*” yang diambil dari kata *rantau*, memiliki arti khusus: meninggalkan daerah inti Minang untuk proses menimba ilmu atau terkait dengan faktor ekonomi dan nantinya akan kembali dalam keadaan matang (Miert, 2003, p. 75). Tradisi rantau bahkan sampai masa sekarang ini masih tetap dilakukan orang masyarakat Minang, baik dalam lingkup Pulau Sumatra ataupun diluar pulau. Pada dasarnya terdapat tiga daerah inti di tanah Minangkabau yang pertama-tama didiami oleh orang Minangkabau disebut dengan luhak, yaitu Agam, Tanah Datar, dan Lima Puluh Koto (Kahin, 2005, p. xxix). Oleh karena tradisi rantau yang sudah melekat pada masyarakat Minangkabau, maka tidak heran jika para pelajar dari Minangkabau mendominasi sekolah-sekolah di Batavia dibandingkan dengan pelajar yang berasal dari daerah Sumatra lainnya, termasuk juga dengan keanggotaanya didalam Jong Sumatranen Bond. Terlihat pula awal pergerakan pentingnya di pentas politik Minangkabau pada tahun 1918, tepatnya saat didirikan cabang Padang dan Fort de Kock (Miert, 2003, p. 77). Khusus bagi JSB yang berada

di Sumatra, daerah Padang sebagai pusat rantau dipilih sebagai tempat menuntut ilmu, melakukan aktivitas perekonomian, dll.

Adapun beberapa tokoh Jong Sumatranen Bond yang berasal dari wilayah Sumatra Barat yaitu, Muhammad Yamin (tokoh nasionalis yang pemikirannya banyak tertuang dalam majalah Jong Sumatra dan juga kepengurusan JSB khususnya cabang pusat), Mohammad Hatta (tokoh nasionalis yang duduk sebagai bendahara dalam JSB), Bahder Djohan (tokoh JSB yang cabang Padang), Mohammad Amir (tokoh JSB cabang Bukit Tinggi), Abu Hanifah, Djamaludin Adinegoro dan masih banyak lagi. Sedangkan tokoh-tokoh JSB yang berasal dari luar Sumatra Barat yaitu, Tengku Mansoer (Seorang pangeran dari Sumatra Timur yang terpilih sebagai ketua pertama JSB), Amir Syarifudin (pada tahun 1925 keluar dari JSB, kemudian mendirikan Jong Bataks Bond), Sutan Takdir Alisjahbana, A.K Gani, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat cabang-cabang lain di beberapa wilayah Jawa dan Sumatra yang ikut bermunculan seperti di Fort de Kock (Bukit Tinggi), Buitenzorg (Bogor), Sukabumi, Medan, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, banyak kemelut yang dirasakan karena perbedaan pandangan mengenai nasion Sumatra yang menjadi dasar terbentuknya organisasi Jong Sumatranen Bond. Puncaknya sendiri ketika para pelajar yang berasal dari tanah Batak memutuskan untuk membentuk perhimpunan dari daerahnya sendiri bernama Jong Bataks Bond. Dinamika perjalanan Jong Sumatranen Bond pun tidak berputar sebatas wilayah pusat saja, melainkan tanah kelahirannya di Sumatra yang belum sepenuhnya tersentuh akan cita-cita luhur organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Jong Sumatranen Bond cabang Padang selama kurun waktu 1918-1930. Selain karena merupakan tempat kebanyakan para anggota JSB berasal, cabang Padang adalah yang paling berperan aktif setelah pusat, dan juga nantinya banyak melahirkan tokoh-tokoh Nasionalis. Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang relevan adalah mengenai posisi Jong Sumatranen Bond yang ada di Padang berdiri sebagai cabang organisasi, serta bagaimana dinamika Jong Sumatranen Bond yang fokusnya sebagian besar dilihat dari sudut pandang cabang Padang.

Penelitian relevan yang penulis temukan berhubungan dengan organisasi Jong Sumatranen Bond adalah buku karya Hans Van Miert yang berjudul “Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930”, yang menceritakan tentang gerakan-gerakan etnis dan pemuda khususnya pada masa pergerakan nasional Indonesia serta timbulnya nasionalisme dikalangan masyarakat Bumiputera. Terdapat bab yang membahas mengenai ‘Gerakan Pemuda Sumatera’, dimulai dari pembentukan dan dasar-dasar Jong Sumatranen Bond, permasalahan adat dan Islam di Minangkabau hingga konflik pemuka adat yang bersinggungan dengan Jong Sumatranen Bond, lalu membahas cita-cita nasional Sumatera terkait bahasa dan masa lalu Sriwijaya, sampai dengan kancah perpolitikan Jong Sumatranen Bond.

Kedua, buku karya Darmansyah, dkk berjudul “Jong Sumatranen Bond: Perjuangan Dalam Membangun Persatuan, 1917-1930” terbitan Museum Sumpah Pemuda. Selain buku, terdapat juga penelitian terkait dalam bentuk tesis yaitu

berjudul “Jong Sumatranen Bond: Dari Nasionalisme Etnik Menuju Nasionalisme Indonesia” yang disusun oleh Edy Suwardi dari Universitas Indonesia, pada tahun 2007. Permasalahan yang diangkat dalam thesis milik Edy Suwardi tersebut yaitu mengenai sejauh mana perubahan nasionalisme dalam Jong Sumatranen Bond.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian dasar pemikiran, maka perlunya dipertegas mengenai pembatasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini. Dimana pembatasan dilakukan guna mempermudah fokus penelitian yang masih kompleks, lebih kearah titik persoalan yang akan dikembangkan nantinya. Pembatasan yang lebih sempit tersebut dalam kajian sejarah dibagi menjadi dua, yaitu: batasan tempat dan batasan waktu.

Pada batasan tempat (spasial) penelitian ini sesuai dengan lokasi pembentukan dan perkembangan organisasi Jong Sumatranen Bond yaitu di Padang dan Batavia. Sedangkan batasan waktu (temporal) yang difokuskan dari rentang tahun 1918 dimana pada tahun tersebut merupakan awal berdirinya organisasi Jong Sumatranen Bond cabang Padang, hingga tahun 1930 tepat berakhirnya kiprah Jong Sumatranen Bond sebelum akhirnya mengadakan fusi menjadi Indonesia Muda. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menguatkan pada pembatasan waktu dan peristiwanya.

Dari uraian mengenai pembatasan masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kiprah Jong Sumatranen Bond cabang Padang di wilayah Sumatra sebagai organisasi pemuda dalam pergerakan nasional?
2. Bagaimana dinamika Jong Sumatranen Bond cabang Padang di wilayah Sumatra dalam gerakan nasionalisme?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menganalisis kiprah dan dinamika Jong Sumatranen Bond cabang Padang sebagai organisasi pemuda pergerakan nasional dalam gerakan nasionalisme pada kurun waktu 1918-1930 di wilayah Sumatra.

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan:

1. Memberikan sumbangan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pembelajaran pelengkap kajian sejarah nasional Indonesia khususnya mengenai organisasi Jong Sumatranen Bond cabang Padang
2. Sebagai studi kepustakaan atau literatur bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, khususnya program studi Pendidikan Sejarah yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Pada bagian metode dan bahan sumber, penulisan dari penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah menurut Gilbert J. Garraghan (1957: 33) yaitu seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis guna

membantu pengumpulan sumber sejarah, penilaian secara kritis dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai (Herlina M.S, 2020, p. 1). Dimana langkah-langkah dalam penulisannya memerlukan kumpulan data dan fakta yang diperoleh melalui tahapan penulisan sejarah. Setelah dilakukan pemilihan topik maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah:

a. Heuristik

Heuristik atau pengumpulan sumber merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sejarah yang akan menjadi acuan penulisan sejarah. Menurut Kuntowijoyo (2013:73) data yang dikumpulkan harus sesuai dengan yang akan ditulis. Lebih lanjut lagi, menurut bahannya, sumber itu dapat dibagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan artifact (*artefact*) (Kuntowijoyo, 2018, p. 73). Pada tahapan pengumpulan data, penulis menggunakan buku yang relevan dengan topik penelitian dari milik pribadi, perpustakaan Universitas Negeri Jakarta dan Perpustakaan Nasional Indonesia. Penulis juga mendapatkan arsip atau informasi lainnya yang berasal dari Museum Sumpah Pemuda dan Arsip Nasional Perpustakaan Nasional, serta jurnal online yang diambil dari internet.

b. Verifikasi

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya yaitu verifikasi, atau kritik sejarah, atau keabsahan sumber. Tahap verifikasi itu ada dua

macam: autentisitas, atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kevalidan sumber yang akan digunakan. Peneliti haruslah teliti terhadap bahan sumber yang digunakan sebagai acuan penulisannya, mulai dari kertas, tinta, penulisan, maupun penampilan fisik lainnya sebagai autentisitas. Setelah keabsahan sumbernya telah didapatkan, barulah dapat ditaruh kredibilitasnya.

c. Intepretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah merupakan langkah yang dilakukan untuk menguraikan data dan fakta-fakta yang sudah didapatkan melalui penulisan pendapat peneliti (subjektivitas). Namun menurut Kuntowijoyo, Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh (Kuntowijoyo, 2018, p. 78).

d. Penulisan Sejarah

Pada tahapan yang terakhir, yaitu penulisan sejarah atau juga dikenal dengan historiografi. Istilah historiografi dalam khazanah ilmu sejarah, yaitu proses menyusun secara tertulis hasil temuan-temuan yang diperoleh dalam satu penelitian sejarah menjadi cerita yang siap untuk dibaca para pembacanya (Subekti, 2012, p. 2). Dalam penulisan sejarah sendiri sangat mengutamakan aspek kronologis dari suatu peristiwa yang ditulis sebagai bahan penelitian.

2. Sumber Penelitian

Bahan sumber penelitian terbagi atas dua jenis, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sejarah primer, penulis dapatkan dari arsip/ dokumen berupa majalah yang diterbitkan langsung oleh organisasi JSB yaitu Majalah '*Jong Sumatra*'. Lalu koran sejaman yang didapatkan melalui situs Delpher yang merupakan penyedia layanan koleksi digital yang berasal dari berbagai lembaga ilmiah dan perpustakaan (umumnya berbahasa Belanda) seperti *De Sumatra Post*, *Sumatra-Bode*, *Het Nieuws Van Den Dag Voor Nederlandsh-Indie*, *De Express*, dan lainnya, serta koleksi dokumentasi menyangkut organisasi Jong Sumatranen Bond dari Perpustakaan Nasional Indonesia dan Museum Sumpah Pemuda, keduanya berlokasi di Jakarta. Disamping sumber primer, penulis juga mencari sumber sekunder dari literatur beberapa buku terkait, buku karangan Hans Van Miert, berjudul *Dengan Semangat Berkobar (Nasionalisme dan Gerakan Pemuda Indonesia, 1918-1930)*, buku terbitan Museum Sumpah Pemuda yaitu karangan Darmasnyah, dkk, dengan judul *Jong Sumatranen Bond Perjuangan dalam Membangun Persatuan (1917-1931)*. Dan masih banyak lagi literatur-literatur yang bersinggungan dengan sejarah organisasi Jong Sumatranen Bond.